

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Artinya bahwa semua masyarakat Indonesia secara hukum mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, lingkungan yang sehat, tempat tinggal yang layak, dan pelayanan kesehatan yang baik.

Amanat Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 saat ini belum dilaksanakan secara optimal. Dari segi kualitas lingkungan hidup, kondisi di Indonesia sekarang ini justru banyak mendapat sorotan publik dengan adanya berbagai macam masalah lingkungan dan bencana alam yang terjadi. Pencemaran lingkungan yang meliputi air, udara dan tanah, masalah sampah plastik, serta pemanasan global masih banyak menjadi bahan pemberitaan. Kasus pencemaran yang terjadi dapat berpengaruh pada individu, masyarakat dan biota liar alami (Yudo dan Said, 2019). Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memberikan tekanan tersendiri terhadap lingkungan. Jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi salah satu penyebab Indonesia berada dalam kondisi degradasi lingkungan yang serius (Angriani dkk, 2018). Sejatinya dengan adanya kualitas lingkungan yang baik merupakan salah satu modal penting terlaksananya pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Air termasuk dalam salah satu sumberdaya alam yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Ratnaningsih dkk, 2018). Air bersih merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Ketersediaan

air termasuk dalam salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* atau biasa disingkat dengan SDGs (Hoelman, 2015). Air bersih ini dapat diperoleh dari sumber mata air yang ada di pegunungan, danau ataupun dari pengolahan air sungai (Aditya, 2015). Salah satu fungsi air sungai adalah sebagai sumber air baku yang dapat diolah menjadi air bersih untuk keperluan sehari-hari. Di Indonesia, pengolahan air sungai tersebut dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) secara fisika dan kimiawi (Susanti, 2010). Adanya aktivitas masyarakat di sekitar sungai yang meliputi kegiatan perdagangan, pasar, industri dan pemukiman menimbulkan potensi meningkatnya tingkat pencemaran air sungai (Hanifah dan Widyastuti, 2017).

Kabupaten Pati memiliki sungai yang umumnya berfungsi untuk pengairan sawah. Tipe sungai di Kabupaten Pati adalah pada saat musim kemarau mengalami kekeringan, sedangkan pada musim penghujan airnya meluap. Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati 2010 – 2030 menyebutkan bahwa indeks kualitas air dihitung dengan menggunakan tiga sungai di Kabupaten Pati yaitu Sungai Sani, Sungai Jiglong, dan Sungai Lengkowo. Pemilihan Sungai Sani sebagai prioritas untuk dikendalikan pencemarannya karena Sungai Sani berfungsi sebagai sumber air baku PDAM dan dimanfaatkan masyarakat di bidang pertanian untuk irigasi (D. Kabupaten Pati, 2017a). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menjelaskan bahwa air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Kondisi sungai sebagai salah satu sumber air baku di beberapa wilayah Indonesia berada jauh di atas baku mutu yang dipersyaratkan (Suryani, 2016). Dengan adanya pengendalian pencemaran di Sungai Sani diharapkan kondisinya tetap memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 salah satu isu strategis urusan pemerintahan wajib bidang lingkungan hidup adalah pemantauan status mutu air. Pemantauan kualitas air yang telah dilakukan masih berada di bawah 50%

dari jumlah sungai yang ada dan terbatas pada beberapa sungai yang berada di lingkungan yang berpotensi tercemar sehingga menyebabkan indeks kualitas air masih rendah dan belum mewakili kondisi sebenarnya. Dengan kondisi yang ada saat ini, diperlukan upaya dan langkah nyata dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi pencemaran air di Kabupaten Pati. Kondisi kualitas air Sungai Sani dapat diketahui dengan melakukan perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan penentuan status mutu air. Penentuan status mutu air perlu dilakukan karena berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan pemantauan pencemaran kualitas air (Hamuna dkk, 2018). Dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks kualitas air (IKA) mempunyai bobot sebesar 30% (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2014). Pada perhitungan nilai IKA, data yang dipergunakan adalah data kualitas air permukaan yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai.

Pemilihan sungai sebagai indikator kualitas lingkungan disebabkan karena sungai mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Sungai merupakan sumber air minum dan sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti pertanian, perikanan, industri serta sebagai sumber energi (Tomas dkk, 2017). Adanya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dapat berakibat pada menurunnya kualitas air di sumber air baku karena adanya penggunaan lahan dan aktivitas manusia (Bhaskoro dan Ramadhan, 2018). Alih fungsi lahan menjadi daerah pemukiman dan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pertanian, perindustrian, peternakan dan kegiatan lainnya tanpa adanya perilaku yang ramah lingkungan dapat mempengaruhi kualitas air sungai. Dengan adanya kondisi tersebut, maka kualitas dan kuantitas air sungai menjadi penting untuk dijaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah telah mengatur upaya untuk pengelolaan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air yang diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut telah diatur tata cara bagi Pemerintah Daerah khususnya kabupaten/kota dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air.

Parameter kunci yang diukur dalam perhitungan IKA adalah padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologis (BOD), kebutuhan oksigen kimia (COD), Total Fosfat, Fecal Coliform, dan Total Coliform (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dijelaskan mengenai batasan wilayah sungai yang telah diatur oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengelolaan daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara utuh dan diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan pengelolaan daerah aliran sungai yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan. Secara spesifik salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah adalah melaksanakan penerapan, bimbingan teknis dan fasilitasi teknik konservasi tanah dan air dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air. Upaya pengelolaan daerah aliran sungai agar tercapai peningkatan kualitas air sungai merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang mendiami sekitar daerah aliran sungai. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan maupun melalui suatu forum atau komunitas. Kesadaran untuk turut serta memelihara lingkungan perlu ditumbuhkan karena pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga lingkungan sekitar dan dampak yang akan terjadi apabila masyarakat acuh terhadap kondisi lingkungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku dan pandangan masyarakat diantaranya yaitu pendidikan dan akses untuk mendapatkan informasi, pekerjaan, norma adat, pendapatan, dan sanksi hukum. Faktor-faktor tersebut berpengaruh dalam membentuk sikap dan pengetahuan individu untuk dapat berperan serta ataupun berperilaku negatif (Syahrani dkk, 2004). Selama ini masyarakat lebih sering memposisikan dirinya hanya sebagai penerima manfaat sedangkan untuk urusan pengelolaan sumber daya air agar kualitasnya tetap terjaga dengan baik cenderung hanya diserahkan kepada pemerintah. Stigma yang ada di

masyarakat tersebut harus diperbaiki sehingga masyarakat sadar tentang hak untuk berperan dalam pengelolaan kualitas sumber daya air. Adanya peran serta masyarakat semakin dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya (Lastiantoro dan Cahyono, 2015). Upaya pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air tanpa disertai dengan adanya kesadaran dan peran serta aktif dari masyarakat dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai (Yogafanny, 2015). Sehubungan dengan kondisi yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan penelitian terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas sumber daya air di Kabupaten Pati dengan studi kasus kondisi air pada Sungai Sani.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kualitas dan status mutu air dari Sungai Sani?
- b. Bagaimana peran lembaga pemerintah dalam peningkatan kualitas air Sungai Sani?
- c. Bagaimana bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas air Sungai Sani?
- d. Bagaimana rumusan strategi peningkatan kualitas air Sungai Sani yang sesuai?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis kualitas dan status mutu air Sungai Sani.
- b. Menganalisis peran lembaga pemerintah dalam peningkatan kualitas air Sungai Sani.
- c. Menganalisis bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas air Sungai Sani.
- d. Merumuskan strategi peningkatan kualitas air Sungai Sani yang sesuai.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Air di Kabupaten Pati diharapkan mempunyai manfaat yaitu :

- a. Dalam pengembangan bidang ilmu lingkungan adalah menambah pengetahuan terkait kondisi kualitas dan status mutu air Sungai Sani serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas air.
- b. Manfaat praktis adalah memberikan informasi kepada semua pihak tentang bagaimana pentingnya peran masyarakat dalam peningkatan kualitas air Sungai Sani.
- c. Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah selaku pengambil kebijakan dalam peningkatan kualitas air Sungai Sani.

1.5. Orisinalitas

Penelitian terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas air sungai sudah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian yang berlokasi di Sungai Sani Kabupaten Pati belum pernah dilaksanakan.

Beberapa penelitian terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Sekolah Pascasarjana

Tabel 1. Penelitian – penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterbaruan
1.	Siti Fadjarajani, Elgar Balasa Singkawijaya, Tineu Indriane, 2018.	Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sungai Cimulu Di Kota Tasikmalaya	Aktifitas penduduk di sekitar Sungai Cimulu yaitu kegiatan pemukiman dan ekonomi berpengaruh pada kondisi Sungai Cimulu. Peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan masih perlu pemahaman dan daya dukung dalam mengelola lingkungan sungai. Metode analisa yang digunakan metode triangulasi dan reduksi data.	Pengumpulan data yang dilakukan tidak hanya dengan menggunakan hasil wawancara dari narasumber dan observasi lapangan tapi juga dari hasil pengisian kuesioner oleh 90 responden. Selain peran serta masyarakat, penelitian ini menganalisis kondisi dan status mutu air sungai, peran lembaga pemerintah, tingkat peran serta masyarakat dan merumuskan strategi pengelolaan menggunakan metode AHP.
2.	Fitriza Yuliana dan Septu Haswindy, 2017	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Permukiman Pada Kecamatan Tungkil Iilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan hubungan antara karakteristik masyarakat dengan tingkat partisipasi.	Menganalisis kondisi air sungai, peran lembaga dan merumuskan strategi pengelolaan sumber daya air menggunakan metode AHP.
3.	Frida Mamuko, Walangitan dan W. Tilaar, 2016	Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Diketahuinya tingkat persepsi masyarakat terhadap rehabilitasi hutan dan lahan serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.	Menganalisis kondisi air sungai, peran lembaga dan merumuskan strategi pengelolaan sumber daya air menggunakan metode AHP.
4.	Lorenza R. Radjabaycolle dan Sumardjo, 2014	Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cikapundung di Kelurahan Dago Bandung	Diketahuinya tingkat partisipasi masyarakat dan kecenderungan sikap masyarakat di Desa Dago dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Metode yang digunakan uji statistik chi-square dan korelasi <i>Rank Spearman</i>	Tingkat peran serta masyarakat menitikberatkan pada tahap pelaksanaan. Merumuskan strategi pengelolaan sumber daya air menggunakan metode AHP.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterbaruan
5.	Agus Eko Kurniawan, 2014	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Banjir Terpadu DAS Kemoning Di Kabupaten Sampang	Diketahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan banjir DAS Kemoning Kabupaten Sampang. Dirumuskannya strategi pengelolaan banjir terpadu berbasis partisipasi masyarakat di DAS Kemoning di Kabupaten Sampang.	Menganalisis kondisi dan status mutu air sungai. Tidak menggunakan analisis spasial dalam menjelaskan pencemaran yang terjadi di sungai. Penelitian ini tidak memasukkan sektor akademisi sebagai populasinya. Untuk perumusan strategi pengelolaannya menggunakan metode AHP.
6.	Diah Auliyani, 2013	Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Mangrove Di Desa Pesisir Kabupaten Rembang : Tinjauan Berdasarkan Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan	Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan menunjukkan pola yang semakin menurun. Faktor dominan yang berpengaruh pada tingkat partisipasi tersebut adalah faktor persepsi, peran pemerintah, dan aktivitas kelompok.	Penelitian lebih menitikberatkan peran serta masyarakat pada tahap pelaksanaan. Menganalisis hubungan antara karakteristik masyarakat dengan tingkat peran serta menggunakan uji korelasi Spearman. Merumuskan strategi pengelolaan sumber daya air menggunakan metode AHP.
7.	Fransisca Emilia, 2013	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai	Diketahui aktivitas pengelolaan sumber daya alam di Desa Keseneng. Diketahui aspek-aspek pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di Desa Keseneng.	Analisis data terkait aktivitas fungsi pengelolaan sumber daya air lebih menitikberatkan pada tahap pelaksanaan (<i>actuating</i>). Merumuskan strategi pengelolaan dengan metode AHP.
8.	Maridi, 2012	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Keduang Wonogiri Indonesia	Dalam pengelolaan DAS, SDM atau masyarakat merupakan komponen penting dalam upaya konservasi DAS. Peran serta masyarakat ditingkatkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui	Penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi air sungai, peran lembaga, bentuk dan tingkat peran serta masyarakat serta rumusan strategi yang sesuai. Hubungan karakteristik masyarakat dengan tingkat peran serta di analisis dengan menggunakan uji korelasi

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Keterbaruan
			penyuluhan dan pelatihan.	Spearman. Perumusan strategi menggunakan metode AHP.
9.	Ni Komang Ayu Artiningsih, 2008	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Pengelolaan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat di Sampangan dan Jombang dapat mereduksi timbulan sampah yang dibuang ke TPA.	Menganalisis tingkat peran serta masyarakat. Merumuskan strategi pengelolaan sumber daya air menggunakan metode AHP.
10.	Indriana Puspta Widyasari, 2008	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang	Peran serta masyarakat belum dapat dilakukan dengan optimal karena kurangnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah, penghasilan masyarakat yang masih rendah, sumber daya manusia yang kurang, pola kerja yang berpengaruh pada waktu luang dalam kegiatan bersama.	Selain bentuk dan tingkat peran serta masyarakat, penelitian ini menganalisis tentang kondisi dan status mutu air sungai serta strategi pengelolaan sungai yang sesuai. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 90 orang. Hubungan antara karakteristik masyarakat dengan tingkat peran serta di uji dengan uji korelasi Spearman. Merumuskan strategi pengelolaan menggunakan metode AHP.

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah kombinasi antara lokasi penelitian dan metode analisa yang digunakan. Belum ada penelitian mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas sumber daya air yang berlokasi di Sungai Sani dengan menggunakan analisa statistik korelasi Rank Spearman untuk mengetahui hubungan peran serta masyarakat dengan karakteristik masyarakatnya serta merumuskan strategi pengelolaan sungainya menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).